# KAJIAN PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN KAMPUNG TUMENGGUNGAN LEDOK SEBELUM dan SESUDAH BERUBAH MENJADI KAMPUNG WISATA TRIDI THE STUDY SLUMNESS LEVEL CHANGE OF KAMPUNG TUMENGGUNGAN LEDOK BEFORE AND AFTER TURN INTO KAMPUNG WISATA TRIDI

# Fifi Damayanti

Dosen SIPIL, Fakultas Teknik, Universitas Tribhuwana Tungga Dewi, Malang e-mail: fifidamayanti17408@yahoo.co.id

#### Handika Setya Wijaya

Dosen SIPIL, Fakultas Teknik, Universitas Tribhuwana Tungga Dewi, Malang e-mail: ndokingsmiling@gmail.com

# **ABSTRAK**

Salah satu permukiman kumuh yang ada di kota Malang adalah kampung Tumenggungan Ledok, di RW 12, Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Blimbing. Kampung ini telah menjadi sebuah kampung wisata sejak tahun 2016 dengan nama Kampung 3D (Kampung Tridi). Dengan adanya kampung wisata tersebut, masyarakat telah berupaya untuk meningkatkan kualitas kampung dengan cara melakukan perbaikan drainase, jalan kampung serta melakukan pengolahan sampah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perubahan kampung Tumenggungan Ledok menjadi kampung wisata 3D terhadap tingkat kekumuhan kampung tersebut. Penelitian mengenai slum area ini menggunakan metode kuantitatif dengan membandingkan tingkat kekumuhan kampung sebelum dan sesudah adanya Kampung Tridi. Berdasarkan hasil observasi dan analisis menunjukkan bahwa meski terjadi penurunan nilai kekumuhan kampung dari 580 menjadi 510, tapi tidak terjadi perubahan tingkat kekumuhan kampung. Tingkat kekumuhan kampung Tumenggungan Ledok tetap berada di tingkat kawasan kumuh sedang. Sehingga dapat diartikan bahwa adanya perubahan kampung menjadi kampung wisata tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kekumuhan kampung tersebut. Oleh sebab itu perlu adanya pembenahan di Kampung 3D dengan melihat faktorfaktor penyebab kekumuhan kampung. Selain itu penilaian tingkat kekumuhan perlu dilakukan secara berkala sebagai evaluasi dari setiap solusi yang dilakukan.

Kata kunci: kampung tridi, tingkat kekumuhan, analisis kuantitatif

#### **ABSTRACT**

One of slum area in Malang is Tumenggungan Ledok village, located in RW 12, Kesatrian Village, Blimbing District. This village has been transformed into a tourist village since 2016 under the name Kampung 3D (Kampung Tridi). Since then the community has tried to improve the quality of the village by building and repairing drainage, roads and sewers and processing waste. The purpose of this study was to determine the effect of changes in the village of Tumenggungan Ledok into a tourist village on the level of village slums. The method used in the study is a quantitative method by comparing the slums level of village before and after the existence of Tridi Village. The results showed that despite a decrease in village slum values from 540 to 420. However, based on the observation results, there was no change in the slum level of the village, the level of slums in Tumenggungan village was still at the level of the slum area. This means that the change in the village into a tourist village does not have any influence on the level of village slums. Therefore the handling of slum areas in 3D villages needs to be carefully considered by looking at the village slum factors. In addition, the slum level assessment needs to be done periodically as an evaluation of each solution made.

Keywords: village, level of slums, quantitative analysis

#### 1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan dan pertumbuhan masyarakat, maka munculnya permukiman kumuh tidak bisa dihindari. Permukiman kumuh tidak hanya tumbuh dan berkembang di kota-kota besar atau metropolitan namun juga di kota-kota sedang dan kecil yang menjadi kota penyangga. Pertumbuhan permukiman kumuh di kota-kota sedang secara langsung maupun kecil teesebut akan memiliki dampak pada pertumbuhan kawasan kumuh di kota besar sekitarnya. Sehingga penanganan kawasan kumuh tidak hanya dibutuhkan di kota besar, namun juga di kota-kota yang sedang berkembang.

Kota Malang sebagai kota berkembang di Jawa Timur juga tidak luput dari masalah kawasan kumuh. Salah satu kawasan kumuh yang ada di kota Malang adalah kampung Tumenggungan Ledok di RW 12, Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Blimbing. Kampung ini berada di bantaran sungai Brantas, tepatnya di Jalan Tumenggungan Ledok. Sejak tahun 2016, kampung ini telah berubah menjadi sebuah kampung wisata dengan nama Kampung 3D (Kampung Tridi). Adanya perkembangan kampung menjadi sebuah kampung wisata, memunculkan opini bahwa kampung ini tidak lagi

menjadi salah satu kawasan kumuh di kota Malang. Opini tersebut muncul karena adanya perubahan secara fisik yang terlihat di dalam kampung tersebut.

Opini yang berkembang tersebut, mendorong peneliti untuk menganalisis kebenaran bahwa dengan perubahan kampung menjadi kampun wisata mampu menghilangkan kekumuhan yanv ada pada kampung. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan tingkat kekumuhan yang ada pada kampung sebelum dan sesudah adanya kampung 3D. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui bahwa langkah-langkah penanganan kawasan kumuh yang dilakukan telah sesuai, serta menemukan solusi yang tepat dalam menangani kekumuhan yang ada di kampung 3D.

Ada 2 permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan berikut adalah mengenai adanya pengaruh berubahnya kampung Tumenggungan Ledok menjadi sebuah kampung wisata 3D dapat menyelesaikan masalah kekumuhan yang ada di kampung 3D. Selain itu tulisan ini juga membahas mengenai seberapa besar dampak munculnya kampung Tridi terhadap nilai tingkat kekumuhan.

#### 2. TINJAUAN PUSTAKA

Permukiman kumuh muncul sebagai dampak dari pesatnya pertumbuhan penduduk serta tidak diimbanginya oleh ketersediaan permukiman. Permukiman kumuh adalah kondisi lingkungan hunian yang memiliki kualitas hunian tidak layak huni. Permukiman kumuh memiliki beberapa ciri antara lain: dalam luasan yang terbatas kepadatan bangunan sangat tinggi; bangunan yang ada memiliki kualitas yang sangat rendah; rawan munculnya penyakit lingkungan dan sosial dalam permukiman; prasarana lingkungan yang kurang atau bahkan tidak memadai sehingga membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya.

Permukiman kumuh tidak hanya ada di kota-kota besar/metropolitan, permukiman ini juga dapat dijumpai di kota kecil maupun kota sedang/berkembang meski dengan skala atau tingkat kekumuhan yang berbeda. Perkembangan kawasan kumuh yang berada di kota sedang dan berkembang mempengaruhi perkembangan kawasan kumuh kota besar di sekitarnya. Kawasan kumuh di kota-kota tersebut didorong oleh faktor alami seperti kelahiran dan kematian, serta faktor ekonomi yang menarik pendatang dari luar kota.

Adapun ciri-ciri kawasan kumuh tercermin pada:

1. Penampilan fisik bangunannya yang semakin kontruksif, yang artinya bahwa bangunan-bangunan temporer semakin banyak berdiri. Selain itu

fisik bangunan-bangunan tersebut secara harfiah tak terurus dan tanpa ada perawatan:

- 1. Status ekonomi masyarakat umumnya adalah masyarakat dengan tingkat pendapatan yang rendah
- 2. Masyarakat memiliki heterogenitas dan kepadatan penduduk yang tinggi;
- Kepadatan bangunan yang tinggi terlihat dari sempitnya atau bahkan tidak ada jarak antar bangunan menunjukkan bahwa kepadatan bangunan yang tinggi. Selain itu kawasan tidak memiliki master plan atau site plan yang terencana;
- 4. Tingginya tingkat kriminalitas atau kejahatan yang mengindikasikan bahwa kondisi social masyarakatnya yang buruk;
- 5. Kondisi sistem sanitasi yang kurang baik
- 6. Banyaknya masyarakat pendatang yang bertempat tinggal dengan menyewa.

Berbagai aspek atau dimensi seperti peruntukan lokasi kawasan yang harus sesuai dengan rencana tata ruang, letak/kedudukan lokasi terhadap kawasan di sekitarnya, status (kepemilikan) tanah, tingkat kepadatan bangunan serta kepadatan penduduk, kondisi fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal digunakan sebagai pertimbangan untuk penentuan kriteria kawasan permukiman kumuh. Selain kriteria tersebut, kriteria sebagai kawasan penyangga kota metropolitan; seperti kawasan permukiman kumuh teridentifikasi yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan kawasan yang menjadi bagian dari kota metropolitan.

Menurut DitJen Cipta Karya, identifikasi kawasan kumuh dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria. Kriteria-kriteria tersebut adalah:

#### Kriteria Vitalitas Non Ekonomi

Kriteria ini digunakan untuk menentukan atau menilai kawasan kumuh dengan mempertimbangkan indikasi terhadap penanganan peremajaan kawasan kumuh. Indikasi tersebut dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kelayakan kawasan permukiman tersebut, apakah masih layak sebagai kawasan permukiman atau sudah tidak sesuai lagi. Variabelvariabel yang digunakan dalam kriteria ini antara lain:

- a. Variabel kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau RDTK. Variable ini dipandang perlu sebagai legalitas kawasan dalam ruang kota adalah.
- b. Variabel fisik bangunan perumahan permukiman dalam kawasan kumuh. Variabel ini memiliki indikasi berupa penanganan kawasan

- permukiman kumuh dalam hal kelayakan suatu hunian berdasarkan intensitas bangunan yang terdapat didalamnya.
- c. Variabel kondisi kependudukan dalam kawasan permukiman kumuh. Variabel ini memiliki indikasi terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan kerapatan dan kepadatan penduduk.

#### 2. Kriteria Vitalitas Ekonomi

Kriteria ini dianggap memiliki kepentingan berdasarkan pada sasaran program penanganan kawasan permukiman kumuh, terutama pada kawasan kumuh sesuai gerakan "Kota tanpa Kawasan Kumuh". Gerakan ini merupakan komitmen dalam Hari Habitat Internasional, sehingga kriteria Vitalitas Ekonomi mempunyai tingkat kepentingan penanganan kawasan permukiman kumuh dalam kaitannya dengan indikasi pengelolaan kawasan. Peubah penilai untuk kriteria ini antara lain:

- a. Tingkat kepentingan kawasan terhadap wilayah kota. Suatu kawasan dikatakan strategis bila jarak kawasan dekat dengan pusat kota.
- b. Fungsi kawasan dalam peruntukan ruang kota. Fungsi kawasan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah pusat-pusat aktivitas bisnis dan perdagangan/niaga, seperti pasar dan pertokoan; terminal atau stasiun, atau fungsi lainnya.
- c. Jarak antara kawasan terhadap tempat mata pencaharian penduduk yang tinggal di kawasan kumuh.

# 3. Kriteria Status Tanah

Kriteria status tanah yang dimaksud adalah status kepemilikan tanah dalam kawasan kumuh. Kriteria yang tertuang dalam Inpres No. 5 tahun 1990 tentang Peremajan Permukiman Kumuh ini merupakan hal penting demi kelancaran dan kemudahan pengelolaanya. Kemudahan dalam pengurusan masalah status tanah mampu meningkatkan ketertarikan investasi dalam suatu kawasan perkotaan. Variabel dari kriteria ini antara lain:

- a. Status pemilikan tanah kawasan permukiman Status kepemilikan tanah dibagi menjadi tanah milik negara, tanah adat dan tanah sengketa.
- Status sertifikat tanah
   Status sertifikat ini dibagi menjadi status tanah belum bersertifikat, sertifikat HGB, dan sertifikat hak milik.
- 4. Kriteria Kondisi Prasarana dan Sarana

Kondisi atau keadaan sarana dan prasarana yang mempengaruhi penilaian kawasan sebagai kawasan kumuh memiliki beberapa peubah penilai, antara lain:

- a. Kondisi Jalan.
- b. Kondisi Drainase.
- c. Kondisi Air bersih
- d. Kondisi Air limbah
- 5. Kriteria Komitmen Pemerintah Setempat

Komitmen pemerintah daerah, baik Pemerintahan Daerah Tingkat I maupun Pemerintahan Daerah Tingkat II dianggap memiliki andil yang besar terhadap terselenggaranya penanganan kawasan permukiman kumuh. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menginginkan adanya keteraturan pembangunan terutama kawasan yang ada di daerahnya.

Variabel dari kriteria ini akan meliputi:

- a. Keinginan pemerintah dalam melakukan penanganan kawasan kumuh. Indikasi dari peubah antara lain penyediaan dana dan mekanisme kelembagaan penanganannya.
- b. Ketersediaan perangkat dalam penanganan kawasan kumuh. Perangkat yang simaksud seperti halnya rencana penanganan (grand scenario) kawasan, rencana induk (master plan) kawasan dan lainnya.
- 6. Kriteria Prioritas Penanganan

Untuk menentukan lokasi prioritas penanganan, selanjutnya digunakan kriteria lokasi kawasan permukiman kumuh. Kriteria ini diindikasikan memiliki pengaruh terhadap (bagian) kawasan perkotaan metropolitan sekaligus sebagai kawasan permukiman penyangga. Kriteria ini menghasilkan lokasi kawasan permukiman dengan prioritas penanganan berdasarkan letaknya yang berdekatan dengan kawasan perkotaan. Penentuan kriteria ini menggunakan variabel sebagai berikut:

- a. Jarak antara lokasi kawasan kumuh dengan pusat kota metropolitan.
- b. Jarak antara lokasi kawasan kumuh dengan kawasan pusat pertumbuhan bagian kota metropolitan.
- c. Jarak antara lokasi kawasan kumuh dengan kawasan lain (perbatasan) bagian kota metropolitan.
- d. Jarak antara lokasi kawasan kumuh dengan letak ibukota daerah yang bersangkutan.

Penilaian kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan sistem pembobotan pada masing-masing kriteria diatas. Setiap kriteria memiliki bobot pengaruh yang berbeda-beda. Selanjutnya dalam penentuan bobot kriteria bersifat relatif dan bergantung pada preferensi individu atau kelompok masyarakat dalam melihat pengaruh masing-masing kriteria.

Penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan pada hipotesis awal bahwa perubahan kampug Tumenggungan Ledok menjadi sebuah

Kampung Wisata Tridi memiliki pengaruh yang nyata terhadap nilai dan tingkat kekumuhan kampung.

Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

- 1. Untuk mengetahui apakah dengan berubahnya kampung menjadi sebuah kampung wisata 3D dapat menyelesaikan masalah kekumuhan yang ada di kampung 3D.
- 2. Untuk mengetahui apakah dampak munculnya kampung Tridi terhadap nilai tingkat kekumuhan.

Tabel 1.

Parameter pada Variabel Kriteria Penentuan Kawasan Permukiman Kumuh

KRITERIA	VARIABEL	PARAMETER		вовот	
Vitalitas Non Ekonomi	Komponen Fisik Bangunan	l/ l - t	> 100 unit/ha	50	
		Kepadatan	80 - 100 unit/ha	30	
		Bangunan	< 80 unit/ha	20	
			> 50%	50	
		Temporer	25% - 50%	30	
			< 25%	20	
		Jarak Antar Bangunan	< 1,5 m	50	
			1,5 - 3 m	30	
			> 3 m	20	
	Komponen Kependudukan	Kepadatan Penduduk	> 500 jiwa/ha	50	
			400 - 500 jiwa/ha	30	
			< 400 jiwa/ha	20	
			> 2%	50	
		Pertumbuhan	1,7% - 2%	30	
		Penduduk	< 1,7%	20	
	Letak Strategis	Sangat Strateg	is	50	
		Kurang Strateg	30		
Vitalitas Ekonomi		Tidak Strategis	20		
	Jarak dengan	> 10 km	50		
	tempat mata	1 - 10 km	30		
	pencaharian	< 1 km	20		
	Fungsi Kawasan Sekitar	Pusat Bisnis da	50		
		Pusat Pemerin	30		
		Permukiman d	20		
Status Tanah	Dominasi status tanah	Belum	50		
		Sertifikat HGB	ertifikat HGB		
		Sertifikat Hak I	20		
	Status	Tanah Negara		50	
	Kepemilikan	Tanah Masyara	30		
	Tanah	Tanah Sengket	20		
	Kondisi Jalan Lingkungan	Sangat Buruk (	50		
Sarana dan Prasarana		Buruk ( 50% - 7	30		
		Baik ( <50 )	20		
	Kondisi Drainase	Genangan > 50	50		
		Genangan 25 -	30		
		Genangan < 25	20		
	Kondisi Air	Pelayanan <30	50		
	Minum	Pelayanan 30%	30		

#### 3. METODE PENELITIAN

Dalam mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk digunakan teknik analisis yaitu analisis kuantitatif komparatif. Metode komparatif dipakai dalam membandingkan nilai kekumuhan kampung Tridi pada tahun 2011 dan 2018, yaitu pada tahun sebelum dan sesudah kampung berubah menjadi kampung wisata. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah 748 warga kampung Tridi. Sedangkan sampel adalah 100 orang warga yang telah ditentukan. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara yang memiliki konsep atau pertanyaan yang sudah jelas. Daftar pertanyaan wawancara dibuat berdasarkan variable dan instrument yang ingin diteliti.

# 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

# **Kampung Tridi**



Gambar 1 Peta Lokasi Kampung Tridi Tahun 2011 (sumber : Google Earth)



Gambar 2 Peta Lokasi Kampung Tridi Tahun 2018 (sumber : Google Earth)

Kampung 3D atau Kampung Tridi merupakan sebuah kampung wisata yang berada di Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, lebih tepatnya terletak pada Jalan Temenggungan Ledok, RT 1 – 4, RW 12, Komplek PJKA, di sebelah timur Jembatan Embong Brantas, Malang. Kampung Tridi Kesatrian berada di sebelah utara bantaran Sungai Brantas. Kampung ini juga berbatasan secara langsung dengan Kampung Warna-Warni di sebelah selatan dengan penghubung sebuah spot wisata berupa jembatan kaca. Kampung Tridi terletak tidak jauh dari pusat kota Malang, sekitar 500 meter dari Stasiun Kereta Kota Malang, dan sekitar 1 kilometer dari arah Alun Alun Tugu Balai Kota. Kampung Tridi memiliki luas ± 1,12 ha.

Warga kampung Tumenggungan Ledok mendapat inspirasi dari warga Kampung Wisata Jodipan atau yang dikenal sebagai Kampung Warna-Warni yang merubah tampilan kampung sebuah kampung wisata. Ide muncul dari salah satu warga yang melihat potensi kampung wisata dengan konsep menghadirkan gambar 3 dimensi atau mural yang dilukis pada dinding-dinding bangunan, dan fasilitas umum seperti yang ada di luar negri. Warga melihat belum ada destinasi wisata yang mengusung konsep mural tersebut di Kota Malang. Oleh karena konsep yang diusung adalah gambar mural maka kampung Tumenggungan Ledok ini dinamai dengan nama Kampung Tridi (3D).

Permasalahan yang ada di kawasan kumuh kampung Tumenggungan Ledok sangat kompleks. Kampung ini memiliki masalah kepadatan penduduk yang tinggi, sempitnya drainase, kurangnya pengelolaan sampah, kurang layaknya penyediaan air bersih dan saluran pembuangan yang sehat. Faktor bahaya juga merupakan faktor yang dimiliki kampung ini. Hal ini terjadi karena letak kampung yang berdekatan dengan rel kereta api dan

berada di bantaran sungai. Selain itu permasalahan sosial juga ditemui di kampung ini, antara lain kenakalan remaja, minimnya tingkat pendidikan serta tingkat pengangguran.

Berikut merupakan tabel skoring identifikasi tingkat kekumuhan Kampung 3D tahun 2011 dan 2018.

Tabel 2.

Hasil Skoring Parameter pada Variabel Kriteria Penentuan Kawasan Permukiman

Kumuh

KRITERIA	VARIABEL	PARAMETER		вовот	2011	2018
Vitalitas Non Ekonomi	Komponen Fisik Bangunan	Kepadatan Bangunan	> 100 unit/ha	50		50
			80 - 100 unit/ha	30	50	
			< 80 unit/ha	20		
		Bangunan Temporer	> 50%	50	20	20
			25% - 50%	30		
			< 25%	20		
		Jarak Antar Bangunan	< 1,5 m	50	50	50
			1,5 - 3 m	30		
			> 3 m	20		
		Kepadatan Penduduk	> 500 jiwa/ha	50		
			400 - 500 jiwa/ha	30	50	50
	Komponen		< 400 jiwa/ha	20		
	Kependudukan	Pertumbuhan Penduduk	> 2%	50		20
			1,7% - 2%	30	20	
			< 1,7%	20		
	Letak Strategis	Sangat Strategis		50		
Vitalitas Ekonomi		Kurang Strategis		30	50	50
		Tidak Strategis		20		
	Jarak dengan	> 10 km 1 - 10 km		50	30	30
	tempat mata			30		
	pencaharian	< 1 km		20		
	Fungsi Kawasan Sekitar	Pusat Bisnis dan Perkantoran		50		
		Pusat Pemerintahan		30	50	50
		Permukiman dan lainnya		20		
Status Tanah	Dominasi status tanah	Belum	,	50		
		Sertifikat HGB		30	50	30
		Sertifikat Hak Milik		20		
	Status	Tanah Negara		50		
	Kepemilikan	Tanah Masyarakat Adat		30	50	50
	Tanah	Tanah Sengketa		20		
Sarana dan Prasarana	Kondisi Jalan Lingkungan	Sangat Buruk ( > 70% )		50		
		Buruk ( 50% - 70% )		30	30	20
		Baik ( <50 )		20		
	Kondisi Drainase	Genangan > 50%		50		
		Genangan 25 - 50%		30	30	20
		Genangan < 25%		20		
	Kondisi Air	Pelayanan <30%		50	_	
	Minum	Pelayanan 30%		30	20	20
		. c.ayanan 30/0	30			

Berdasarkan rumus penilaian kawasan permukiman kumuh maka diperoleh:

Nilai Ambang Batas = 
$$\frac{\sum \text{Nilai tertinggi} - \sum \text{Nilai Terendah}}{3}$$
$$= \frac{750 - 300}{3} = \frac{450}{3}$$
$$= 150$$

Maka berdasarkan rumus tersebut diperoleh penilaian kawasan sebagai berikut:

- (1) Kategori Kawasan Sangat Kumuh Berada Pada Nilai: 600 750
- (2) Kategori Kawasan Kumuh Sedang Berada Pada Nilai: 449 599
- (3) Kategori Kawasan Tidak Kumuh Berada Pada Nilai: 298 448.

Pada tahun 2011 kawasan ini memiliki kepadatan bangunan lebih besar 100 unit/ha dengan jarak antar bangunan yaitu kurang dari 1,5 meter. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah bangunan tetap memiliki kepadatan bangunan lebih dari 100 unit/ha. Oleh karena kepadatan bangunan yang makin tinggi maka jarak antar bangunan semakin sempit.

Ditinjau dari kesesuaian penggunaan lahan, adanya kampung tersebut menunjukkan ketidaksesuaian penggunaan lahan. Hal ini dikarenakan lahan yang menjadi tempat tinggal warga merupakan lahan/tanah milik negara karena berada di bantaran sungai dan pinggir rel kereta api.

Komponen kependudukan Kampung Tumenggungan Ledok pada tahun 2011 menunjukkan bahwa kepadatan penduduk sebesar 599 jiwa/ha dengan jumlah keseluruhan 670 jiwa dengan catatan khusus bahwa sejumlah warga yang menetap dalam kampong tersebut belum memiliki tanda pengenal atau KTP. Tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun tersebut adalah 0,62 %. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah penduduk kampung 3D adalah 748 jiwa dengan kepadatan 668 jiwa/ha dan pertumbuhan sebesar 0,5 %.

Dari segi vitalitas ekonomi, letak Kampung 3D sangat strategis karena berdekatan dengan pusat pemerintahan dan perekonomian. Kampung 3D yang terletak di Jalan Tumenggungan Ledok hanya berjarak 1 kilometer dari kantor walikota Malang dan 500 meter dari stasiun Kota Baru. Mayoritas penduduk memiliki mata pencaharian sebagai pegawai swasta/buruh dengan tempat kerja yang dekat. Di samping itu sebagian masyarakat bekerja sebagai pedagang, dengan jumlah pedagang pada tahun 2018 yang lebih besar daripada tahun 2011. Jarak tempat kerja warga berkisar antara 1 - 10 km dari rumah. Kawasan di sekitar kampung 3D merupakan kawasan pusat perekonomian dan peekantoran.

Letak kampung yang berada di kawasan bantaran sungai menunjukkan status kepemilikan tanah yaitu sebagai tanah negara, terutama departemen pengairan dan PJKAI. Dominasi status pada kampung tersebut mayoritas adalah tanah yang belum bersertifikat pada 2011 dan menjadi tanah dengan status Sertifikat HGB pada tahun 2018.

Dengan adanya kampung 3D, warga RW 12 berusaha untuk meningkatkan kesadaran akan kebersihan lingkungan. Warga telah memperbaiki dan memperlebar jalan yang ada di dalam kampung sehingga kondisinya lebih baik. Pada tahun 2011 sekitar 60% jalan lingkungan memiliki kondisi yang buruk dan semakin membaik pada tahun 2018 dengan sekitar 30% kondisi jalan yang buruk. Perbaikan jalan dilakukan warga secara swadaya dan mendapat bantuan sponsor.

Sejak tahun 2016 hingga 2018 telah dilakukan beberapa kali perbaikan drainase di kampung Temenggungan Ledok. Saluran drainase di kampung 3D tidak terhubung dengan drainase kota. Drainase di kampung 3D menghubungkan saluran pembuangan dari rumah-rumah warga dan berakhir ke sungai. Perbaikan ini berpengaruh pada jumlah genangan yang ada di Kampung 3D. Pada tahun 2011 sebanyak +- 30% bagian kampung terdapat genangan air. Selain itu, terdapat sumber mata air yang selalu meluap hingga ke rumah warga pada saatbterjadi musim hujan dengan curah hujan yang tinggi. Namun jumlah tersebut berkurang pada tahun 2018 dengan perkiraan jumlah area yang tergenang kurang dari 25%. Serta sumber mata air yang ada telah ditutup dan dialirkan ke toilet-toilet dan wc umum.

Warga di Kampung 3D telah lama menggunakan sumber air bor dan PDAM sebagai sumber air minum. Air limbah di kampung 3D merupakan air limbah rumah tangga. Air limbah rumah tangga tersebut dibuang melalui pipa-pipa pembuangan ke sungai Brantas. Selain air limbah, permasalahan mengenai kondisi persampahan di Kampung 3D juga menjadi kriteriatingkat kekumuhan. Dari hasil observasi didapatkan data bahwa sampah-sampah rumah tangga dikumpulkan oleh petugas kebersihan yang kemudian dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir. Berdasarkan data kuisoner kondisi pelayanan mengenai sampah telah baik dengan tingkat pelayanan lebih dari 60%. Namun bila dilihat dari hasil observasi lebih lanjut hal ini belum sesuai dengan fakta di lapangan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tempat sampah yang ada di Kampung 3D masih minim secara kuantitas. Selain itu tempat sampah yang tersedia belum memisahkan mana sampah organik dan anorganik. Sungai juga masih menjadi tempat pembuangan sampah oleh warga. Kesadaran akan kebersihan lingkungan masih belum sepenuhnya dipahami oleh warga.

Berdasarkan tabel komparasi skoring di atas dapat dilihat bahwa total nilai kekumuhan Kampung 3D pada tahun 2011 adalah 540 dan pada tahun

2018 sebanyak 420. Sebelum berubahnya kampung menjadi kampung wisata, kawasan tersebut menjadi kawasan kumuh dengan tingkat kekumuhan sedang. Dengan tumbuhnya kampung menjadi Kampung 3D, nilai kekumuhan kampung telah berkurang, namun tingkat kekumuhan kampung tetaplah sama.

Sehingga dapat dikatakan bahwa berubahnya kampung menjadi kampung wisata 3D tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kekumuhan kampung. Usaha penyelesaian masalah kekumuhan selama ini belum secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa masalah kekumuhan kampung 3D terletak pada penggunaan lahan yang tidak sesuai, tingkat bahaya, penyediaan drainase, pengolahan limbah manusia, dan minimnya kesadaran warga terhadap pengaruh kebersihan lingkungan bagi kesehatan fisik dan psikis masyarakat.

#### 5. KESIMPULAN

Dari hasil analisis komparasi dapat dikatakan bahwa berubahnya kampung menjadi kampung wisata 3D tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kekumuhan kampung. Usaha penyelesaian masalah kekumuhan selama ini belum secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa masalah kekumuhan kampung 3D terletak pada penggunaan lahan yang tidak sesuai, tingkat bahaya, penyediaan drainase, pengolahan limbah manusia, dan minimnya kesadaran warga terhadap pengaruh kebersihan lingkungan bagi kesehatan fisik dan psikis masyarakat. Maka solusi untuk mengatasi masalah kekumuhan di Kampung 3D sebaiknya berfokus dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu kepedulian pemerintah daerah juga diperlukan dalam mengatasi masalah kekumuhan pada Kampung 3D.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Direktorat pengembangan permukiman (DitJen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum). (2006) *Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Penyangga Kota Metropolitan*.
- Fitria, Niken. (2014) *Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat.* Jurnal Teknik POMITS, 3 (2): 240 244
- Istikasari, May dan Parfi Khadiyanto. (2014) *Identifikasi Permukiman Kumuh Di Pusat Kota Jambi*. Jurnal RUANG, 2 (4): 301 310
- Noris, Dody, Sugianto, dan Irin Caisarina. (2017) Kajian Perubahan Tingkat Kekumuhan Pasca Penanganan Kawasan Kumuh Cot Bak U, Kota

Sabang Provinsi Aceh. Jurnal Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala, 1 (2): 359 – 370